

Restoran di Jakarta Diizinkan Buka Hingga Pukul 00.00 WIB

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengizinkan restoran atau rumah makan dan kafe beroperasi mulai sore hari hingga maksimal pukul 00.00 WIB. Aturan terbaru tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 1122 tahun 2021 tentang PPKM Level Tiga, yang dirilis di Jakarta, Rabu (22/9), sesuai ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 tahun 2021.

Dalam Keputusan Gubernur DKI itu disebutkan restoran atau rumah makan dan kafe dapat menerima makan di tempat dengan jam operasional pukul 18.00 hingga maksimal 00.00 WIB dengan protokol kesehatan ketat.

Adapun kapasitas maksimal pengunjung yang diizinkan adalah sebanyak 25 persen. Ketentuan itu mengatur satu meja diisi oleh maksimal dua orang dengan waktu makan yang diperbolehkan adalah maksimal 60 menit. Pengunjung dan karyawan wajib melalui aplikasi Peduli Lindungi untuk proses pemeriksaan sebelum memasuki restoran atau kafe.

Sedangkan aturan untuk tempat yang sama dalam Keputusan Gubernur DKI itu masih sama dengan ke-

putusan sebelumnya. Untuk kegiatan warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dan menerima makan di tempat hingga pukul 21.00 WIB, maksimal pengunjung 50 persen dan waktu makan 60 menit.

Pengunjung dan pegawai sudah divaksinasi minimal dosis pertama, kecuali bagi yang masih dalam masa tenggang tiga bulan setelah positif Covid-19 dengan bukti hasil laboratorium, warga dengan kontraindikasi vaksinasi berdasarkan pemeriksaan medis dengan keterangan dokter dan anak-anak usia kurang dari 12 tahun.

Restoran/rumah makan, kafe yang lokasinya berada di dalam gedung atau toko atau area terbuka baik di lokasi tersendiri atau di pusat perbelanjaan atau mal juga sama boleh buka hingga pukul 21.00 WIB.

Kemudian kapasitas maksimal 50 persen, waktu makan 60 menit, satu meja diisi dua orang dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

Keputusan Gubernur DKI itu ditandatangani Anies Baswedan pada Senin (20/9) dan berlaku sejak 21 September hingga 4 Oktober 2021.

● yan

Pandemi Belum Selesai, Kadisdik Imbau Guru Lebih Ketat Laksanakan Prokes



FOTO: HUMAS PEMKOT BEKASI

Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Bekasi, Inayrullah (kanan) saat meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di salah satu sekolah di Kota Bekasi, Rabu (22/9).

KOTABEKASI (IM) - Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) Terbatas di Kota Bekasi berjalan dengan baik. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dr. Inayrullah mengatakan, hingga hari ini PTM terbatas berjalan baik dan lancar. "Evaluasi PTMT, alhamdulillah sampai hari ini berjalan bagus dan belum ada temuan (masalah) yang luar biasa," ujar Inayrullah dalam siaran pers Humas Pemkot Bekasi, Rabu (22/9).

Dari sisi kedisiplinan protokol kesehatan guru dan siswa, Inayrullah menilai uji coba PTMT sudah berjalan baik namun, masih perlu ditingkatkan.

"Sudah berjalan bagus, namun harus diperketat dan terus ditingkatkan oleh gurunya dan melakukan evaluasi di tiap harinya, cari yang masih perlu diperbaiki," ucapnya.

"Sekarang yang kita siapkan daring dan luring yang sudah diinformasikan ke selu-

ruh sekolah. Maka saya minta yang mau melakukan luring harus menyampaikan persiapan kepada kami (Pemerintah Kota Bekasi) sesuai ketentuan yang ada. Tidak boleh jalan sendiri sebelum diizinkan. Nanti akan ada tim untuk melakukan review persiapan agar nanti bisa aman semuanya," terangnya.

Pihaknya juga berpesan kepada para guru harus lebih berhati-hati. Meski kurva Covid-19 sudah menurun, namun protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan dengan ketat.

"Kita sudah melakukan pengamatan, dari warga sekolah maupun orang tua yang mengantarkan anaknya. Saya sudah komunikasi, untuk mereka-mereka ini untuk dikedatkan lagi prokesnya. Ini sudah baik yang PTMT maupun yang tidak PTM. Mari jaga kondisi ini secara gotongroyong agar semuanya berjalan dengan baik," pinta Inayrullah. ● mdl/ber

Pemprov DKI Bertahap Buka Wisata di Kepulauan Seribu

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan uji coba pembukaan tempat wisata di Jakarta, secara bertahap. Pemprov DKI saat ini masih fokus pada uji coba tahap pertama tempat wisata di Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta Timur, dan Setu Babakan di Jakarta Selatan.

Kepala Seksi Pengawasan Hiburan dan Rekreasi Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) DKI Jakarta, Iffan Radja, mengatakan, di luar tiga lokasi wisata yang sedang diuji coba, tempat lainnya masih ditutup sementara. "Wisata di Kepulauan Seribu, belum ada pembahasan untuk uji coba pembukannya," katanya di Jakarta, Rabu (22/9).

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebelumnya telah menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1122 tahun 2021 tentang PPKM level tiga. Dalam Keputusan Gubernur itu, mengatur kegiatan di tempat wisata umum dan area publik lain masih ditutup sementara.

Saat ini hanya ada tiga

tempat wisata di DKI yang diizinkan melakukan uji coba pembukaan, yakni Ancol, TMII dan Setu Babakan, dengan protokol kesehatan sesuai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan. Sementara itu, jam operasional di tiga tempat wisata itu juga dibatasi hingga pukul 21.00 WIB.

Pengelola tempat wisata yang sedang diuji coba tersebut, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan anak-anak usia di bawah 12 tahun dilarang memasuki tempat wisata. Pemprov DKI juga menerapkan kebijakan ganjil-genap kendaraan bermotor di sepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat wisata, pada Jumat hingga Ahad pukul 12.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Sementara itu, untuk cakupan vaksinasi masyarakat di Kepulauan Seribu, berdasarkan data corona.jakarta.go.id yang diakses pada Rabu (22/9) pukul 12.00 WIB, jumlah sasaran vaksinasi mencapai 22.297 orang yang tersebar di 127 RT. Dari jumlah itu, sebanyak 19.127 orang sudah divaksinasi dosis satu dan sebanyak 13.019 orang sudah mendapatkan vaksinasi dosis kedua. ● yan

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



KELANJUTAN PEMBANGUNAN TUGU SEPEDA

Warga berjalan di dekat proyek pembangunan tugu sepeda di jalur pedestrian Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (22/9). Dinas Perhubungan DKI Jakarta memastikan pembangunan tugu sepeda masih berlanjut, dan pembangunannya hingga saat ini telah mencapai 90 persen.

Usulan Interpelasi Formula E Diminta Segera Dibahas di Rapat Paripurna

Saat ini banyak anggota Dewan yang tertarik ikut menyetujui interpelasi Formula E. Namun beberapa pernyataan memang tertunda karena kendala arahan dari pimpinan fraksi masing-masing.

JAKARTA (IM) - Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono meminta kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk segera mengagendakan pembahasan usulan hak interpelasi terkait Formula E ke Rapat Paripurna.

"Kita akan desak kepada pimpinan untuk segera, saya bahasakan harus ikan sepat ikan gabus (semakin cepat semakin bagus) tidak bertele-tele," ujar Gembong saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/9).

Gembong mengaku sengaja mendatangi Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi hari ini, untuk mendesak segera membahas Formula E.

Anggota Komisi A DPRD DKI ini menyebut proses interpelasi harus tetap berlanjut karena merupakan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh setiap anggota Dewan.

"Ini dalam konteks pengawasan kita sebagai anggota Dewan terhadap pengelolaan keuangan daerah," tutur dia.

Dia mengatakan, saat ini

banyak anggota Dewan yang tertarik ikut menyetujui interpelasi Formula E.

Namun beberapa pernyataan memang tertunda karena kendala arahan dari pimpinan fraksi masing-masing. "Tapi secara personal mereka oke terhadap apa yang kita sampaikan (terkait interpelasi)," tutur dia.

Sebagai informasi, usulan penggunaan hak interpelasi atau hak bertanya langsung anggota Dewan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan resmi diserahkan ke pimpinan anggota DPRD DKI Jakarta Kamis (26/8), untuk dilakukan pembahasan.

Hak interpelasi diatur dalam Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 yang terdapat dalam BAB VIII tentang pelaksanaan hak DPRD dan Anggota DPRD

DKI.

Hak interpelasi dijelaskan dalam Pasal 120 merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Gubernur DKI mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hak interpelasi tersebut bisa diusulkan paling sedikit 15 anggota Dewan dan terdiri lebih dari satu fraksi.

Untuk pengusulan, PSI dan PDIP sudah memenuhi persyaratan mengenai jumlah anggota fraksi PDIP 25 orang dan PSI 8 orang.

Dalam dokumen pengajuan hak interpelasi dilengkapi dengan materi kebijakan dan alasan diminta hak interpelasi.

Setelah usulan disampaikan, tahap selanjutnya tertuang dalam Pasal 121, yakni dibahas dalam rapat paripurna.

Namun untuk membahas hak interpelasi, rapat paripurna harus dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota atau

50 persen plus 1.

Saat ini anggota DPRD DKI Jakarta berjumlah 105 setelah Ketua Fraksi PKS meninggal dunia pertengahan Agustus 2021.

Jadi harus ada setidaknya 53 orang yang hadir dalam rapat paripurna pembahasan interpelasi untuk mencapai kuorum.

Dalam rapat yang sudah mencapai kuorum, pengusul hak interpelasi akan menyampaikan penjelasan lisan atas usulan hak interpelasi, disusul tanggapan anggota DPRD lainnya melalui fraksi atas penjelasan pengusul.

Keputusan hak interpelasi disetujui atau tidak akan diambil berdasarkan jumlah anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna.

Apabila disetujui lebih dari 50 persen peserta kuorum yang hadir, maka interpelasi akan dilanjutkan dengan pemanggilan Gubernur Anies untuk menjelaskan program Formula E. ● yan

Massa Geruduk DPRD DKI Desak Formula E Dibatalkan

JAKARTA (IM) - Massa demonstran mengatasnamakan 'Aksi Jakarta Bergerak' kembali menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka menuntut pembatalan ajang Formula E di Jakarta pada 2022.

Pantauan di lokasi, sekelompok massa datang dari arah Jl MH Thamrin menuju kantor DPRD DKI Jakarta di Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sejak pukul 10.30 WIB. Aparat kepolisian pun bersiaga di lokasi.

Massa berpakaian hitam bertuliskan 'Jakarta Bergerak'. Mereka tampak membawa 1 unit mobil komando disertai spanduk bertuliskan 'JAKARTA BERGERAK, TOLAK DAN BATALKAN FORMULA E'.

Koordinator Lapangan Jakarta Bergerak, Sisca Rumondor, memastikan pihaknya akan terus menggelar aksi unjuk rasa sampai Formula E dibatalkan. Pihaknya juga

meminta keterbukaan alokasi anggaran.

"Kami mendesak DPRD buka pintu, khususnya kepada para komisi yang menangani Formula E. Ini masyarakat mau nanya kok, butuh kejelasan. Jadi Komisi E, Komisi B, mereka harus mau menerima kunjungan kami karena tuntutan dari Jakarta Bergerak adalah kami menolak, kami minta batalkan dan balikin itu uang rakyat yang begitu besar yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov DKI dan Gubernur Anies Baswedan. Sebuah prioritas yang tidak tepat guna," kata Sisca di depan DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/9).

"Kita bergerak terus, sampai ada kejelasan keterbukaan. Hati-hati ya, kita butuh keterbukaan. Itu ke mana uang rakyat yang begitu besar, telusuri, diusut. Seharusnya kan bisa digunakan untuk hal yang

bisa membantu perekonomian masyarakat sesudah pandemi. Memangnya bisa menduga 2022 itu bisa selesai? Siapa yang bisa tahu," sambungnya.

Tak lama, polisi langsung meminta agar massa aksi segera bubar. Polisi beralasan Jakarta masih PPKM level 3.

"Atas nama undang-undang, kami minta yang ada di sekitar DPRD agar meninggalkan tempat. Situasi masih PPKM level 3. Apabila tidak, kami akan ambil tindakan tegas" kata Kapolsek Gambir, AKBP Kade Budiarta di lokasi.

Namun, massa tetap berupaya mengirimkan perwakilan untuk melakukan audiensi. Akhirnya, tujuh orang perwakilan massa diperkenankan masuk ke dalam untuk melakukan audiensi di DPRD DKI. Sedangkan sisanya diminta membubarkan diri ke arah Tugu Tani, Jakarta Pusat. ***

Tingkat Pengangguran Terbuka di Jakarta Barat Naik Dua Kali Lipat

JAKARTA (IM) - Tingkat pengangguran terbuka di Jakarta Barat saat pandemi Covid-19 meningkat hampir dua kali lipat.

"Kita pakai data dari BPS (Badan Pusat Statistik), tahun 2019 (sebelum pandemi Covid-19) tingkat pengangguran terbuka 5,21 persen, tahun 2020 10,10 persen," kata Kabag Ekonomi Pembangunan Pemerintah Kota Jakarta Barat, Iqbal Idham Ramid saat ditemui Rabu (22/9).

Kata Iqbal, jumlah pengangguran di tahun 2020 adalah 107.658 orang. Untuk menekan angka pengangguran terbuka, Iqbal mengaku pihaknya telah melakukan sejumlah pelatihan.

"Suku Dinas Ketenagakerjaan, misalnya, melakukan pelatihan (untuk menjadi)

satpam supaya dia bisa melamar dan sudah punya sertifikasinya," jelas Iqbal.

Pelatihan mengemudi juga diberikan kepada warga yang kehilangan pekerjaan. "Supaya nanti punya SIM (surat izin mengemudi), supaya mereka bisa jadi sopir grab atau gojek," lanjut Iqbal.

Selain itu, warga yang kehilangan pekerjaan, juga didorong untuk bekerja sebagai wirausahawan. Program ini, kata Iqbal, sejalan dengan program Jakpreneur Pemprov DKI Jakarta. Targetnya, sebanyak 40.000 warga Jakarta Barat menjadi wirausahawan pada tahun ini.

"Untuk sekarang sudah 80 persen dari target tercapai dan kita masih ada satu triwulan lagi untuk bisa kejar 100 persen," ungkap Iqbal. ● yan

DWP Kabupaten Bekasi Gelar Rapat Pembinaan Personal Branding

CIKARANG SELATAN

(IM) - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggelar Rapat Pembinaan kepada seluruh anggota DWP, dengan mengusung tema Etika dan Pengembangan Kepribadian Pengurus DWP Dalam Meningkatkan Citra Positif Pemda Kabupaten Bekasi. Rapat ini berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Cikarang Selatan, Selasa (21/9).

Acara itu turut dihadiri oleh Ketua DWP Kabupaten Bekasi, Yaya Darlia Herman Hanafi, Ketua Tim Penasehat DWP Kabupaten Bekasi, Ria Dani Ramdan, serta narasumber Widayiswara dari Kementerian Sekretariat Negara, Mega Putri dan Sandra Erawanto.

Ketua DWP Kabupaten Bekasi, Yaya Darlia Herman Hanafi mengatakan, dengan adanya kehadiran para anggota DWP dalam rapat pembinaan kali ini dapat menunjukkan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pengurus DWP maupun istri ASN.

"Kegiatan ini sangat pent-



FOTO: DOK.PIM, PROKOPIM SETDA KABUPATEN BEKASI

Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pemerintah Kabupaten Bekasi saat Rapat Pembinaan kepada seluruh anggota di Hotel Sahid Jaya, Cikarang Selatan, Selasa (21/9).

ing untuk menunjukkan bahwa ibu-ibu DWP ini memiliki tanggung jawab dalam tugasnya di organisasi dan sebagai istri ASN, terkait penampilannya untuk menyesuaikan diri, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan," ujarnya dalam rilis Prokopim Setdakab Bekasi, Selasa (21/9) malam.

Dirinya menambahkan, rapat mengenai personal branding tersebut dilakukan guna menambah ilmu pengetahuan hingga kecakapan diri, yang dapat diimplementasikan oleh para istri ASN dalam mendampingi suami.

"Hari ini temanya tentang personal branding, ini sangat berguna bagi istri ASN yang mendampingi suami, agar kita bisa lebih menambah wawasan, memperbaiki diri dan memiliki karakter yang baik," ucapnya.

Dirinya berharap melalui kegiatan ini, para anggota DWP mampu berevaluasi tentang cara bersikap, tutur kata, etika dan pergaulan sehingga bisa meningkatkan citra Pemerintah Kabupaten Bekasi yang baik. ● mdl